

LAPORAN TESIS
REGULASI DAN IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN DOKTER
WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA



Birgitta Wangsa Winatha

23.C2.0052

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2026

LAPORAN TESIS
REGULASI DAN IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN DOKTER
WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

Diajukan dalam Rangka Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum Kesehatan



Birgitta Wangsa Winatha

23.C2.0052

Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Namun, Indonesia masih menghadapi permasalahan kekurangan dan ketidakmerataan tenaga medis, khususnya dokter spesialis dan subspesialis. Di sisi lain, terdapat fenomena datangnya dokter warga negara asing untuk melakukan pemeriksaan awal yang diumumkan di *social media* dan perkembangan praktik kedokteran lintas negara melalui *telesurgery*. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan pendayagunaan dokter WNA yang mampu memberikan kepastian hukum terkait kompetensi, perizinan, pengawasan, perlindungan pasien, serta pertanggungjawaban hukum apabila terjadi maladministrasi atau malpraktik. Oleh karena itu menarik untuk mengetahui regulasi dan hambatan pendayagunaan dokter warga negara asing, serta potensi akibat hukum bagi dokter warga negara asing yang memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia apabila terjadi maladministrasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian eksploratif dan preskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara sebagai bahan pengayaan. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, dan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dokter WNA di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya, namun implementasinya masih menghadapi hambatan administratif, antara lain lamanya proses perizinan, belum optimalnya koordinasi lintas instansi, dan kendala bahasa. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, dokter WNA dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan sifat dan bentuk pelanggarannya melalui mekanisme administratif, disiplin profesi, perdata, pidana, serta keimigrasian. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan teknis yang lebih jelas, koordinasi dan pengawasan terpadu, serta penguatan perlindungan pasien untuk menjamin kepastian hukum dan keselamatan pasien.

Kata kunci: Dokter warga negara asing, pendayagunaan, perlindungan hukum, pertanggungjawaban hukum, maladministrasi.

ABSTRACT

Health is a fundamental right of every citizen guaranteed by the Constitution, and the State bears the responsibility for ensuring its fulfillment. Indonesia continues to face shortages and unequal distribution of medical personnel, particularly specialists and subspecialists. At the same time, there has been a phenomenon of foreign doctors coming to Indonesia to conduct initial medical examinations, as announced through social media, as well as the development of cross-border medical practice through telesurgery. These developments highlight the importance of regulating the utilization of foreign doctors to ensure legal certainty concerning professional competence, licensing, supervision, patient protection, and legal liability in cases of maladministration or medical malpractice. Therefore, it is important to examine the regulations governing and the obstacles to the utilization of foreign doctors, as well as the potential legal consequences for foreign doctors providing healthcare services in Indonesia in cases of maladministration.

This study employs an empirical juridical with exploratory and prescriptive specifications. Data was obtained through literature research involving primary, secondary, and tertiary legal materials, supplemented by interviews as supplementary data. The data were analyzed qualitatively based on applicable laws and regulations, legal doctrines, legal theories, and research findings.

The findings indicate that the utilization of foreign doctors in Indonesia has been regulated under Law Number 17 of 2023 on Health and its implementing regulations. However, its implementation continues to encounter administrative obstacles, including lengthy licensing procedures, suboptimal coordination among institutions, and language barriers. In the event of legal violation, foreign doctors may be held accountable, depending on the nature and form of violation, through administrative, professional disciplinary, civil, criminal, and immigration mechanism. Therefore, clearer technical regulations, integrated supervision, and stronger patient protection mechanisms are required to ensure legal certainty and patient safety.

Keywords: Foreign doctors, utilization, legal protection, legal liability, maladministration.